

Mekanisme dan Persyaratan Mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Sumsel Babel Capem Lemabang

Heti Nubila¹, Havis Aravik², Fadilla³, Ahmad Tohir⁴

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

⁴ Pascasarjana Universitas Indo Global Mandiri

Email: hetyypcynba@gmail.com, havis@stebisigm.ac.id, dilla@stebisigm.ac.id,
ahmadtohir@uigm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 20, 2026

Revised September 21, 2026

Accepted September 21, 2026

Kata Kunci:

Kredit Usaha Rakyat, UMKM,
Mekanisme Kredit, Persyaratan
Kredit, Bank Sumsel Babel

Keywords:

People's Business Credit (KUR),
MSMEs, Credit Mechanism, Credit
Requirements, Bank Sumsel Babel.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Heti Nubila, et.al Published by
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah
(STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan bagi pengembangan usaha produktif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan KUR pada Bank Sumsel Babel Capem Lemabang berdasarkan hasil Kuliah Kerja Praktik (KKP). Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif melalui observasi, pengamatan terhadap proses pelayanan, serta dokumentasi informasi mengenai prosedur dan persyaratan KUR. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengajuan KUR dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan awal, pengisian formulir, pemeriksaan kelengkapan dokumen, wawancara, survei lapangan, analisis kredit menggunakan prinsip 5C, keputusan dan persetujuan kredit, penandatanganan akad, pencairan dana, serta pembinaan dan monitoring usaha. Persyaratan utama meliputi identitas diri, kartu keluarga, legalitas usaha berupa SKU atau NIB, dokumen pendukung keuangan, serta usaha yang produktif dan layak. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, rendahnya pemahaman prosedur, usaha yang belum stabil, keterbatasan pencatatan keuangan, serta kendala teknis dan verifikasi. Edukasi dan sosialisasi mengenai KUR perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami prosedur, memenuhi persyaratan, dan mampu memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

Kredit Usaha Rakyat (KUR)—or People's Business Credit—is a financing program designed to assist Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in accessing capital for the development of productive business activities. This community service activity aims to provide an understanding of the mechanisms and requirements for applying for KUR at Bank Sumsel Babel (Lemabang Sub-branch), based on findings from a Practical Work Experience (KKP) program. A descriptive approach was employed, utilizing observation of service processes and the documentation of information regarding KUR procedures and requirements. The results indicate that the KUR application process involves several stages: initial application, form completion, document completeness checks, interviews, field surveys, credit analysis based on the 5C principles, credit decision and approval, contract signing, fund disbursement, and ongoing business guidance and monitoring. Key requirements include personal identification, a family card, proof of business legality (such as an SKU or NIB), financial supporting documents, and evidence of a productive and viable business. Implementation challenges identified include incomplete documentation, a lack of understanding regarding procedures, business instability, limited financial record-keeping, as well as technical and verification issues. Education and

outreach regarding KUR need to be enhanced so that the public better understands the procedures, meets the requirements, and is able to utilize the financing productively and responsibly.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Pelaku UMKM tidak hanya berperan dalam menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat serta membuka kesempatan kerja (Gustiana, et.al, 2022). Meskipun demikian, keterbatasan modal masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha masih bergantung pada sumber pembiayaan informal yang dapat memberikan beban biaya relatif tinggi. Oleh karena itu, keberadaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dan mendukung pengembangan usaha produktif (Amelia, et.al, 2025).

Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu (Capem) Lemabang merupakan salah satu unit pelayanan Bank Sumsel Babel yang menyalurkan program KUR kepada masyarakat di wilayah Palembang dan sekitarnya. Program tersebut ditujukan kepada pelaku usaha produktif yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Melalui KUR, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan peluang kerja. Dengan demikian, penyaluran KUR tidak hanya berorientasi pada pemberian kredit, tetapi juga memiliki fungsi dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat dan pemerataan aktivitas ekonomi di daerah.

Namun, kemudahan akses terhadap pembiayaan KUR tetap disertai dengan persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi calon debitur. Pengajuan kredit tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan modal, tetapi harus melalui proses pemeriksaan dokumen, wawancara, survei lapangan, analisis kelayakan, keputusan kredit, penandatanganan akad, dan pencairan. Pihak bank juga melakukan pembinaan serta monitoring setelah dana disalurkan (Juwita, et.al, 2023). Tahapan tersebut diperlukan agar penyaluran kredit dapat diberikan kepada calon debitur yang benar-benar memiliki usaha produktif dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran (Adesti & Aravik, 2023).

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Bank Sumsel Babel Capem Lemabang, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan KUR. Kendala tersebut antara lain ketidaklengkapan dokumen, kurangnya pemahaman terhadap prosedur, usaha yang belum stabil, rendahnya literasi keuangan, serta kesulitan dalam menyediakan data pendukung usaha. Dari sisi bank, terdapat pula tantangan berupa keterbatasan informasi nasabah, kesulitan verifikasi lapangan, risiko kredit bermasalah, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala sistem informasi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan KUR agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat mempersiapkan pengajuan secara lebih baik dan bertanggung jawab.

Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan berbasis pada pengalaman dan hasil observasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Bank Sumsel Babel Capem Lemabang. Data dan informasi diperoleh melalui pengamatan terhadap proses pelayanan dan pengajuan KUR, pemahaman terhadap tahapan administrasi kredit, serta dokumentasi materi mengenai prosedur dan persyaratan KUR. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mekanisme pengajuan KUR mulai dari pengajuan awal sampai dengan pencairan dan monitoring usaha. Dengan pendekatan tersebut, informasi mengenai prosedur kredit dapat disajikan secara lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan pelaku UMKM.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemberian edukasi mengenai persyaratan administrasi, kelayakan usaha, tahapan pengajuan, serta berbagai kendala yang berpotensi dihadapi calon debitur. Materi disusun berdasarkan hasil KKP dan informasi yang diperoleh selama kegiatan di Bank Sumsel Babel Capem Lemabang. Penyampaian dilakukan secara informatif dengan menekankan pentingnya kelengkapan dokumen, kejujuran dalam memberikan informasi usaha, kemampuan membayar angsuran, serta pemanfaatan dana sesuai tujuan pengajuan. Metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai kredit produktif sekaligus mendorong calon debitur agar lebih siap ketika mengajukan KUR (Rika, et.al, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan KUR pada Bank Sumsel Babel Capem Lemabang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan awal oleh calon debitur, pemeriksaan dokumen, wawancara, survei lapangan, analisis kredit, keputusan dan persetujuan kredit, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga pembinaan dan monitoring usaha. Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa penyaluran KUR dilakukan melalui prosedur yang bertujuan memastikan kesesuaian antara kebutuhan pembiayaan, kondisi usaha, dan kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Tahap pertama adalah pengajuan awal. Calon debitur datang ke Bank Sumsel Babel Capem Lemabang dan menyampaikan keinginan untuk memperoleh fasilitas KUR. Selanjutnya, petugas Customer Service atau bagian kredit memberikan formulir permohonan yang harus diisi dengan data pribadi dan informasi mengenai usaha. Tahap ini menjadi dasar bagi pihak bank untuk memperoleh gambaran awal mengenai identitas pemohon dan tujuan pengajuan kredit. Oleh karena itu, calon debitur perlu memberikan informasi secara lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar proses pemeriksaan berikutnya dapat berjalan dengan baik.



Gambar 1
Menyusun Berkas

Tahap berikutnya adalah penerimaan dan pemeriksaan dokumen. Calon debitur menyerahkan dokumen yang diperlukan, antara lain KTP, KK, Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), serta dokumen pendukung lainnya. Petugas melakukan pemeriksaan awal atau *pre-screening* untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan persyaratan dasar. Kelengkapan administrasi menjadi faktor penting karena kekurangan dokumen dapat memperlambat proses pengajuan. Persyaratan administrasi yang tercantum dalam bahan KKP antara lain KTP pemohon dan pasangan, KK, surat nikah atau akta cerai, SKU atau NIB, NPWP untuk nominal tertentu, pas foto, rekening koran atau buku tabungan, serta data pendukung usaha.

Setelah pemeriksaan dokumen, calon debitur menjalani wawancara awal dengan petugas kredit atau Account Officer. Wawancara bertujuan menggali informasi mengenai riwayat usaha, kebutuhan modal, tujuan penggunaan kredit, kemampuan membayar cicilan, dan sumber pendapatan lainnya (Savikoh, et.al, 2025, Suhartono, et.al, 2026). Wawancara menjadi bagian penting karena dokumen administratif belum tentu menggambarkan kondisi usaha secara keseluruhan. Melalui komunikasi langsung, petugas dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai karakteristik usaha dan kondisi ekonomi calon debitur.



Gambar 2
Aktivitas Magang

Tahap selanjutnya adalah survei lapangan atau *on the spot*. Petugas kredit mengunjungi lokasi usaha calon debitur untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Dalam kegiatan tersebut, petugas menilai kondisi dan kelayakan usaha, potensi pendapatan, serta berbagai risiko yang mungkin dihadapi usaha. Survei lapangan juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa usaha benar-benar ada dan berjalan sebagaimana informasi yang diberikan dalam dokumen maupun wawancara. Hasil survei selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kelayakan pengajuan kredit.

Hasil survei kemudian menjadi bagian dari proses analisis kredit. Berdasarkan materi KKP, analisis dilakukan dengan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. *Character* berkaitan dengan kejujuran dan reputasi calon debitur; *Capacity* berkaitan dengan kemampuan membayar pinjaman; *Capital* berkaitan dengan modal yang dimiliki; *Collateral* berkaitan dengan jaminan atau agunan apabila diperlukan; sedangkan *Condition* berkaitan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha. Penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa keputusan kredit tidak semata-mata didasarkan pada jumlah modal yang diminta, tetapi juga mempertimbangkan karakter dan kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban kredit (Nasution, et.al, 2025).

Apabila hasil analisis menyatakan bahwa pengajuan layak, berkas selanjutnya diajukan kepada pejabat pemutus kredit atau pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan, bank mempersiapkan

dokumen administrasi seperti surat persetujuan kredit, perjanjian kredit, jadwal angsuran, dan dokumen pembukaan rekening. Calon debitur kemudian melakukan penandatanganan akad kredit. Pada tahap ini, nasabah memperoleh penjelasan mengenai besaran bunga, jangka waktu kredit, jadwal pembayaran angsuran, denda keterlambatan, serta kewajiban lain yang harus dipenuhi selama masa kredit.

Setelah seluruh dokumen ditandatangani, dana KUR dapat dicairkan ke rekening nasabah. Dalam bahan KKP disebutkan bahwa pencairan dapat dilakukan secara tunai melalui teller atau melalui transfer ke rekening usaha. Namun, proses tidak berhenti setelah dana diterima. Pihak bank tetap melakukan pembinaan dan *monitoring* secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan awal, usaha berjalan dengan baik, serta pembayaran angsuran dilakukan secara lancar dan tepat waktu. Dengan demikian, hubungan antara bank dan debitur tidak hanya bersifat transaksional pada saat pencairan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap keberlanjutan usaha.

Dari sisi jenis pembiayaan, bahan KKP menguraikan beberapa kategori KUR, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil atau KUR Ritel, dan KUR Khusus. KUR Super Mikro disebut memiliki plafon maksimal Rp10 juta dan ditujukan antara lain bagi usaha baru atau usaha rumahan. KUR Mikro memiliki plafon di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta, sedangkan KUR Kecil memiliki plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dan ditujukan bagi usaha yang lebih mapan. KUR Khusus ditujukan bagi kelompok usaha pada sektor tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri olahan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan dapat disesuaikan dengan skala dan karakteristik usaha calon debitur.



Gambar 3
Sosialisasi Tabungan Simple di SMPN 21 Palembang

Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yang perlu menjadi perhatian. Dari sisi nasabah, hambatan yang ditemukan meliputi kurang lengkapnya dokumen, kurangnya pemahaman terhadap prosedur, usaha yang belum stabil, rendahnya literasi keuangan, persoalan agunan, serta kendala teknis dan jaringan. Sebagian pelaku UMKM juga belum memiliki pencatatan keuangan sederhana sehingga sulit menunjukkan kondisi pendapatan dan pengeluaran usaha. Dari sisi bank, kendala dapat berupa keterbatasan data dan informasi nasabah, kesulitan melakukan verifikasi lapangan, risiko kredit bermasalah, target penyaluran, keterbatasan SDM, serta gangguan pada sistem informasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan edukasi yang baik antara bank dan masyarakat agar proses pengajuan KUR dapat berlangsung lebih efektif.

Berdasarkan kegiatan pengabdian tersebut, maka peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme KUR perlu diarahkan pada aspek praktis. Calon debitur perlu mempersiapkan identitas, legalitas usaha, data keuangan, dan dokumen pendukung sebelum datang ke bank. Selain itu, calon debitur perlu memahami bahwa KUR merupakan fasilitas kredit yang harus digunakan secara produktif dan dikembalikan sesuai

jadwal. Pemahaman mengenai tujuan kredit, kemampuan membayar, serta kewajiban setelah pencairan akan membantu mengurangi risiko kesalahpahaman antara nasabah dan pihak bank. Edukasi mengenai prosedur KUR juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan administrasi dan pencatatan usaha sehingga lebih siap mengakses pembiayaan formal (Aravik & Hamzani, 2026).

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Praktik dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Bank Sumsel Babel Capem Lemabang, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan KUR dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan awal, pemeriksaan dokumen, wawancara, survei lapangan, analisis kredit, keputusan kredit, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga pembinaan dan monitoring. KUR memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan modal bagi kegiatan usaha produktif. Namun, keberhasilan pengajuan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, kelayakan usaha, kemampuan membayar, serta kesesuaian calon debitur dengan persyaratan yang berlaku.

Disarankan agar pelaku UMKM meningkatkan literasi keuangan dan administrasi usaha, terutama dalam pencatatan pendapatan, pengeluaran, aset, dan transaksi usaha. Calon debitur juga perlu memastikan legalitas usaha dan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan KUR serta memberikan informasi yang benar kepada pihak bank. Bagi Bank Sumsel Babel Capem Lemabang, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme serta persyaratan KUR dapat terus ditingkatkan, terutama kepada pelaku usaha mikro yang belum memahami prosedur kredit. Dengan komunikasi yang lebih intensif antara bank dan masyarakat, diharapkan akses terhadap KUR menjadi semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung keberlanjutan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adesti, B. A., & Aravik, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Leasing Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. FIF Group Cabang Bukit Palembang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 37-62.
- Amelia, R., Saputra, A. A., Imamah, F. N., Sari, W., Ar-Rifa'i, A., Aravik, H., ... & Faizal, M. (2025). Kegiatan Magang Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)*, 3(1), 7-12.
- Aravik, H., AI Hamzani, (2026). *Politik Ekonomi Islam; Konsep, Sejarah dan Tantangan Kontemporer*, Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Gustiana, N., Aravik, H., & Meriyati, M. (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 341-350.
- Juwita, F., & Aravik, H. (2023). Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 41-58.
- Nasution, A., Nasution, A. I. L., & Lubis, F. A. (2025). Pengaruh 5c (Character, Collateral, Capacity, Capital, Dan Condition) Terhadap Keputusan Pembiayaan

Pada Umkm (Studi Kasus Di Bank Sumut Cabang USU). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 14(02), 913-920.

Rika, A., Nisa, K., & Siregar, R. F. (2024). Pelaksanaan Administrasi Pendidikan Di MIN 3 Medan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 6(2), 104-111.

Savikoh, U., Naajiyah, A., Agustin, W., & Fajariyah, N. A. (2025). Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 382-391.

Suhartono, F Budiyah, RHS Aji, H Aravik, (2026). *Pengantar Manajemen Syariah (Teori, Prinsip dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Deepublish.

